



IMPLEMENTATION OF THE VILLAGE GOVERNMENT DEVELOPMENT STRATEGIC PROGRAM IN BODDIE VILLAGE, MANDALLE DISTRICT, PANKEP REGENCY

Syamsibar

STIA Al Gazali Barru

syamsibar@algazali.ac.id

ABSTRACT

The purpose of the study was to determine the implementation of strategic development programs carried out by the village government in Boddie Village, Mandalle District, Pangkep Regency. This type of research used quantitative research. Quantitative research is a linear research, using statistics, which analyzes the data obtained through questionnaires. Data collection techniques were carried out through questionnaires, observations, interviews and documentation. The results showed that the implementation of strategic development programs had been carried out well in Boddie Village. The average score of respondents' opinion is 3.77 and the average percentage is 75.4 which means the Village Head has implemented strategic village development programs well in the village. As for the factors that support the implementation of strategic village development programs, especially democratic leadership Village heads, motorbikes, and limited social facilities and infrastructure are still modest / lacking the level of community participation is quite high. While the inhibiting factors, especially the village area which is quite large, the condition of the walyan is still difficult to reach with good transportation facilities.

Keywords: Government, Village, Program, Strategic, Development



lisensi CC BY

IMPLEMENTASI PROGRAM STRATEGIS PEMBANGUNAN PEMERINTAH DESA DI DESA BODDIE KECAMATAN MANDALLE KABUPATEN PANGKEP

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi program strategis pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa di Desa Boddie Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep. Tipe penelitian menggunakan Penelitian yang dilaksanakan menggunakan penelitian kuantitatif. penelitian kuantitatif adalah penelitian bersifat linier, menggunakan statistik, yang menganalisis data yang diperoleh melalui angket. Pada penelitian ini, penulis akan memberikan gambaran terhadap variabel yang diteliti, yaitu Implementasi Program Strategis Pembangunan Pemerintah Desa di Desa Boddie Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program strategis pembangunan telah dilaksanakan dengan baik Di Desa Boddie. Rata-rata nilai skor pendapat responden 3,77 dan rata-rata persentase 75.4 yang berarti Kepala Desa telah melaksanakan program-program strategis pembangunan desa dengan baik di desa tersebut. adapun faktor-faktor yang mendukung dalam pengimplementasian program strategis pembangunan desa, terutama kepemimpinan demokratis Kepala Desa, kendaraan sepeda motor, dan terbatasnya sarana dan prasarana sosial masih sederhana / kurang tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi. Sedangkan faktor penghambat terutama luas desa yang cukup luas, kondisi wilayah masih sulit dijangkau dengan baik sarana transportasi.

Kata kunci: *Pemerintah, Desa, Program, Strategis, Pembangunan*

A. PENDAHULUAN

Pemerintahan desa sekarang ini sudah diatur dengan Undang-Undang, yakni Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Sebelum terbitnya Undang-Undang tersebut, Desa diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah yakni PP Nomor 72 tentang desa. Didalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, telah mengatur kondisi normatif pembinaan pembangunan dan pemerintahan desa. Dikatakan kondisi normatif, karena di dalam undang-

undang tersebut diharapkan seluruh desa secara normatif menyesuaikan kondisi di desa dengan kondisi pembangunan skala nasional.

Dengan demikian secara normatif, pembinaan dan pengembangan desa sebagaimana diatur di dalam peraturan tersebut, sehingga implementasi program strategis pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa maka Kepala Desa sebagai penanggung jawab pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa.

Adapun pola strategis yang dilaksanakan Kepala Desa selaku kepala pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan adalah menjadikan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra dalam pelaksanaan pembangunan desa. Lembaga tersebut dikenal sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Konsepsi “desa” menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan penjelasannya dijelaskan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Bintaro (2011 : 34) merinci bahwa desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat di situ (suatu daerah) dalam hubungannya dan pengaruhnya secara timbal-balik dengan daerah lain.

Salah satu karakteristik desa adalah penduduknya yang masih tergolong kurang dibanding dengan perkotaan. Menurut Hanif Nurcholis (2011 : 14), desa adalah penduduknya kurang dari 2500 jiwa. Desa adalah suatu daerah yang dihuni oleh penduduk dan di dalamnya mereka saling bergotong royong dan memiliki suatu sistem kehidupan, yang berupaya secara

bersama-sama mencapai tingkat kesejahteraan sosial di desa. Menurut James Midgley dalam Miftachul Huda (2009 : 72), kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi utama (1) ketika masalah sosial dapat dikelola dengan baik, (2) ketika kebutuhan terpenuhi, dan (3) ketika peluang-peluang terbuka secara maksimal.

Dengan pola yang strategis itu, menjadikan kepala desa dalam melaksanakan fungsinya baik sebagai kepala pemerintah, sekaligus sebagai administrator pembangunan di wilayahnya. Pola strategis demikian menimbulkan semangat demokratisasi dalam pembangunan.

Hal tersebut mendorong demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat dan otonomi daerah sebagaimana terkandung di dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah berupaya seoptimal mungkin melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Desa Boddie adalah salah satu Desa di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep yang sudah terbentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra Kepala Desa di dalam menggerakkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan. Desa tersebut adalah salah satu desa yang cukup berpotensi, terutama sumberdaya manusia yang cukup besar dan memiliki kemampuan kerja yang cukup baik.

Mengingat bahwa Ketua dan pengurus LPM adalah tokoh masyarakat desa maka masyarakat diharapkan berpartisipasi seluas-luasnya dalam pembuatan perencanaan terutama melalui musrembang desa yang dilaksanakan satu kali setiap tahunnya dan melaksanakan sendiri berbagai program yang telah disusun sendiri serta mengawasi sendiri pelaksanaan berbagai proyek-proyek pembangunan termasuk proyek-proyek yang dibiayai melalui APBD, termasuk di dalam menggali potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, yang kesemuanya itu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan latar belakang tersebut, maka Kepala Desa harus mampu mengimplementasikan seluruh program pembangunan yang strategis di desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Boddie Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep.

Permasalahan utama yang terjadi di Desa Boddie Kecamatan Mandalle kabupaten Pangkep tentang Pembangunan Jalan Rabat Beton yang diprogramkan dan dianggarkan pemerintah desa tahun lalu sudah dikerjakan tapi hanya mencapai 70% dan anggaran tersebut sudah dicairkan sampai saat ini pembangunan tersebut belum dilanjutkan pekerjaannya sampai mencapai 100%, Namun anggaran Pembangunan tersebut sudah habis sementara kegiatan Fisik tidak selesai. Atas dasar masalah tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan Judul “Implementasi Program Strategis Pembangunan Pemerintah Desa Di Desa Boddie Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep”.

B.METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilaksanakan menggunakan penelitian kuantitatif. Menurut Saban Echdar (2017) penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, dengan tujuan menguji hipotesis. Menurut Sugiyono (2009) penelitian kuantitatif adalah penelitian bersifat linier, menggunakan statistik, yang menganalisis data yang diperoleh melalui angket. Pada penelitian ini, penulis akan memberikan gambaran terhadap variabel yang diteliti, yaitu Implementasi Program Strategis Pembangunan Pemerintah Desa di Desa Boddie Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, observasi, wawancara dan dokumentasi.

Sampel penelitian: Sampel menurut Sugiyono (2014) adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Untuk melaksanakan penelitian dipilih sampel secara purposive yakni kepada mereka yang mengetahui permasalahan yang dibahas, yakni sebanyak 50% dari populasi, atau $50\% \times 54 \text{ orang} = 27 \text{ orang}$ sebagai sampel meliputi Kepala Desa, aparat kantor desa, Pengurus LPM dan Tokoh Masyarakat. Sampel tersebut sekaligus dijadikan sebagai responden penelitian.

Berhubung karena karakteristik populasi bersifat homogen maka untuk keperluan pengumpulan data lapangan maka penulis menetapkan dan mengambil sampel secara purposive sebanyak 27 orang yang diharapkan sudah dapat mewakili populasi. Adapun perincian populasi adalah :

1. Kepala Desa	1 orang
2. Sekretaris Desa	1 orang
3. Perangkat Desa	14 orang
4. Kepala Dusun	2 orang
5. Tokoh Masyarakat	<u>9 orang</u>
Jumlah sampel penelitian	27 orang

Sampel yang terpilih sekaligus dijadikan sebagai responden penelitian. Untuk melengkapi hasil angket maka sebagian responden dijadikan sebagai nara sumber atau informan wawancara.

C.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

➤ Hasil Penelitian

Implementasi program strategis pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa di Desa Boddie secara garis besar terdiri dari

- a. Pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat
- b. Pemberdayaan masyarakat,
- c. Pelayanan masyarakat,
- d. Penyelenggaraan ketertiban / ketentraman umum, dan
- e. Pembinaan kelembagaan masyarakat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat

Implementasi program strategis pembangunan pemerintahan desa yang dilaksanakan di Desa Boddie terdiri dari :

- a. Pembangunan pemberdayaan masyarakat

Desa Boddie adalah salah satu desa di kabupaten Pangkep, oleh karena itu pemerintah Desa Boddie melaksanakan pembangunan pemberdayaan masyarakat yang telah dilimpahkan kepada desa dan menjadi tanggungjawab Kepala Desa untuk melaksanakannya.

Bentuk-bentuk kegiatan implementasi program strategis pembangunan yang di laksanakan oleh pemerintah desa, yang dipimpin Kepala Desa di Desa Boddie antara lain adalah : (1) perencanaan pembangunan desa, (2) pengawasan tata ruang di wilayah kerjanya, (3) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; (4) penyediaan sarana dan prasarana umum, (5) penanggulangan masalah sosial, (6) membantu pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah; (7)

pengendalian lingkungan hidup; (8) rekomendasi pelayanan kependudukan dan catatan sipil; (9) pelayanan administrasi umum pemerintahan, dan (10) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk mengetahui pendapat responden tentang Kepala Desa Boddie dalam pemberdayaan masyarakat maka dapat dilihat pada tabel frekuensi di bawah ini :

Tabel: 1. Fungsi Kepala Desa Boddie dalam pembangunan pemberdayaan masyarakat

No.	Klasifikasi	Bobot	F	Nilai skor	%
1	Sangat aktif	5	4	20	15
2	Aktif	4	11	44	41
3	Cukup aktif	3	9	27	33
4	Kurang aktif	2	3	6	11
5	Tidak aktif	1	0	0	0
N = 27	Jumlah		27	97	100
	Rata-rata			3,6	72%

Sumber : Hasil Angket (2022)

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa Kepala Desa telah aktif melaksanakan fungsinya dalam pembangunan pemberdayaan masyarakat di Desa Boddie (rata-rata 3,6) dengan kategori "aktif", dengan mencapai 72% dari yang diharapkan.

b. Pemberdayaan melalui pembinaan administrasi kependudukan

Salah satu fungsi Kepala Desa di Desa Boddie adalah penataan administrasi kependudukan. Kantor Desa adalah pangkalan data kependudukan sehingga wajib bagi pemerintah desa untuk melaksanakan administrasi kependudukan, dengan terus mendata penduduk yang ada di wilayahnya, dan mencatatnya dengan baik untuk

bahan pelaporan kepada Pemerintah Daerah kabupaten melalui Camat, yakni kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.

Untuk mengetahui pendapat responden tentang pemberdayaan melalui pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, maka dapat dilihat pada tabel frekuensi di bawah ini :

Tabel: 2. Fungsi Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan administrasi kependudukan di Desa Boddie

No.	Klasifikasi	Bobot	F	Nilai skor	%
1	Sangat aktif	5	7	35	26
2	Aktif	4	13	52	48
3	Cukup aktif	3	4	12	15
4	Kurang aktif	2	3	6	11
5	Tidak aktif	1	0	0	0
N = 27	Jumlah		27	105	100
	Rata-rata			3,9	78%

Sumber : Hasil Angket (2022)

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa Kepala Desa telah aktif melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan administrasi kependudukan (rata-rata 3,9) dengan katagori "aktif", dengan mencapai 78%) dari yang diharapkan.

1. Pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan sarana desa dan partisipasi.

a. Program pembangunan sarana jalan

Salah satu kriteria semakin meningkatnya pemberdayaan warga adalah ditandai oleh semakin meningkatnya pendapatan warga, yang ditandai semakin

mampunya menyekolahkan anak-anaknya, pemilikan kendaraan pribadi, penataan rumah yang semakin baik dan sehat.

Dalam mendorong peningkatan pemberdayaan masyarakat maka salah satu fungsi yang menonjol adalah selalu memprogramkan perbaikan jalan yang menjadi akses warga masyarakat untuk digunakan dalam melaksanakan kegiatan usahanya, dan untuk mengangkut produksi pertanian dan produksi lainnya yang digeluti oleh warga. Semakin baik jalan, maka pengangkutan hasil produksi pertanian dapat lebih mudah dijangkau menuju pusat-pusat pemasaran.

Untuk mengetahui pendapat responden tentang upaya Kepala Desa di dalam memprogramkan perbaikan jalan melalui anggaran dari APBD kabupaten maka dapat dilihat pendapat responden sebagaimana pada tabel di bawah ini;

Tabel: 3. Fungsi Kepala Desa dalam memprogramkan perbaikan jalan Lingkungan / dusun Desa Boddie

No.	Klasifikasi	Bobot	F	Nilai skor	%
1	Sangat aktif	5	4	20	15
2	Aktif	4	16	64	59
3	Cukup aktif	3	4	12	15
4	Kurang aktif	2	3	6	11
5	Tidak aktif	1	0	0	0
N = 27	Jumlah		27	102	100
	Rata-rata			3,8	76 %

Sumber : Hasil Angket (2022)

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kepala Desa aktif memprogramkan perbaikan jalan Lingkungan / Dusun dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa

Boddie (rata-rata 3,8) dengan katagori "aktif", dan mencapai 76% dari yang diharapkan.

b. Partisipasi peningkatan usaha warga

Dalam melaksanakan usaha warga maka masyarakat membutuhkan izin usaha dari Pemerintah Daerah dengan rekomendasi dari Kepala Desa. Untuk melancarkan urusan warga dalam mengurus izin usaha, maka Kepala Desa memberikan kemudahan pemberian rekomendasi kepada warga yang berminat mengurus izin usaha, sebagai bentuk partisipasi Kepala Desa dalam mendorong warga meningkatkan kegiatan usahanya.

Untuk mengetahui pendapat responden tentang partisipasi Kepala Desa di dalam memberikan rekomendasi pengurusan izin usaha maka dapat dilihat pada tabel frekuensi di bawah ini :

Tabel: 4 Fungsi Kepala Desa dalam mendorong kegiatan usaha warga

No.	Klasifikasi	Bobot	F	Nilai skor	%
1	Sangat aktif	5	6	30	22
2	Aktif	4	11	44	41
3	Cukup aktif	3	7	21	26
4	Kurang aktif	2	30	6	11
5	Tidak aktif	1	0	0	0
N = 27	Jumlah		27	101	100
	Rata-rata			3,7	74 %

Sumber : Hasil Angket (2022)

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa

Kepala Desa aktif memberikan rekomendasi pembukaan usaha warga / pengurusan

izin usaha yang diurus pada Dinas Perizinan dan Penanaman Modal kabupaten Pangkep (rata-rata 3,7) dengan katagori ”aktif”, dan mencapai 74% dari yang diharapkan.

1. Pelayanan Masyarakat

a. Pelayanan masyarakat di kantor desa

Berbagai bentuk keperluan masyarakat di kantor Desa Boddie, dan mengharapkan adanya pelayanan yang baik dari aparatur Pemerintah Desa.

Untuk memberikan pelayanan masyarakat yang lebih cepat dan lebih baik, maka Kepala Desa sebagai aparatur pemerintah senantiasa mendorong dan meningkatkan disiplin kepada aparat desa untuk memberikan pelayanan prima kepada warga yang memerlukan bantuan, terutama pembuatan rekomendasi, surat keterangan, dan berbagai bentuk surat-surat yang dibutuhkan warga.

Untuk mengetahui pendapat responden maka dapat dilihat pada tabel frekuensi di bawah ini :

Tabel: 5 Fungsi Kepala Desa dalam memberikan pelayanan warga di kantor Desa

No.	Klasifikasi	Bobot	F	Nilai skor	%
1	Sangat aktif	5	6	30	22
2	Aktif	4	13	52	48
3	Cukup aktif	3	5	15	19
4	Kurang aktif	2	3	6	11
5	Tidak aktif	1	0	0	0
N = 27	Jumlah		27	103	100
	Rata-rata			3,8	76%

Sumber : Hasil Angket (2022)

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa Kepala Desa aktif melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di kantor Desa Boddie (rata-rata 3,8) dengan katagori "aktif", dan mencapai 76% dari yang diharapkan.

b. Koordinator pelaksanaan pelayanan masyarakat

Kepala Desa adalah kepala Pemerintahan, yang berfungsi sebagai koordinator beberapa bentuk pelayanan masyarakat, yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang melaksanakan pelayanan. Bahkan lembaga-lembaga pelayanan harus bekerjasama Kepala Desa dalam pemberian pelayanan. Misalnya pelayanan yang diberikan oleh Posyandu dalam pelayanan kesehatan, BKKBN dalam pelayanan KB, kegiatan PKK dalam pelayanan pemberdayaan keluarga (perempuan), Bimnas dan Babinsa dalam pemberian pelayanan kemandirian, Kantibmas, dan berbagai bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan instansi vertikal di kantor desa.

Untuk mengetahui pendapat responden maka dapat dilihat pada tabel frekuensi di bawah ini :

Tabel: 6. Fungsi Kepala Desa dalam mengkoordinir pelayanan masyarakat

No.	Klasifikasi	Bobot	F	Nilai skor	%
1	Sangat aktif	5	5	25	19
2	Aktif	4	14	56	51
3	Cukup aktif	3	5	15	18
4	Kurang aktif	2	3	6	11
5	Tidak aktif	1	0	0	0

N = 27	Jumlah	27	102	100
	Rata-rata		3,8	76 %

Sumber : Hasil Angket (2022)

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa kepala desa aktif melaksanakan fungsinya dalam mengkoordinir pelayanan masyarakat di Desa Boddie (rata-rata 3,8) dengan katagori "aktif" dan mencapai 76% dari yang diharapkan.

4. Penyelenggaraan Ketertiban Masyarakat / Ketentaman Umum

a. Mengaktifkan kegiatan Poskamling

Untuk membina dan meningkatkan kerukunan bermasyarakat maka diperlukan adanya ketertiban di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu salah satu kebutuhan masyarakat di dalam membina ketertiban dan kerukunan adalah terciptanya keamanan dan ketertiban (Kantibmas) yang baik dan kondusif.

Upaya Kepala Desa Boddie untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang semakin baik adalah mendorong warga masyarakat untuk melaksanakan Siskamling dengan menempatkan Poskamling sebagai pusat kegiatan jaga malam. Kegiatan Siskamling dilaksanakan di pusat pemukiman yang dianggap rawan keamanan, bukan hanya pencurian tetapi keributan akibat sering ada warga yang melakukan perbuatan mengganggu ketenangan dan ketertiban warga yang sedang istirahat di waktu malam hari.

Kegiatan Siskamling dilaksanakan diseluruh dusun yang ada dalam wilayah Desa Boddie, sehingga disetiap Dusun didirikan satu atau dua Poskamling sebagai pusat jaga malam.

Untuk mengetahui pendapat responden tentang upaya kepala desa dalam mendorong warga masyarakat melaksanakan kegiatan Siskamling di Desa Boddie, maka penulis mengemukakan dalam bentuk tabel frekuensi.

Tabel: 7. Fungsi Kepala Desa dalam mendorong kegiatan Siskamling.

No.	Klasifikasi	Bobot	F	Nilai skor	%
1	Sangat aktif	5	4	20	
2	Aktif	4	17	68	
3	Cukup aktif	3	5	15	
4	Kurang aktif	2	1	2	
5	Tidak aktif	1	0	0	
N = 27	Jumlah		27	105	100
	Rata-rata			3,9	78 %

Sumber : Hasil Angket (2022)

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa kepala desa aktif mendorong warga masyarakat dalam melaksanakan Siskamling di setiap dusun dalam wilayah Desa Boddie (rata-rata pendapat responden adalah 3,9 dengan katagoti "aktif" dan mencapai perolehan 78% dari yang di harapkan.

b. Penyuluhan Kantibmas

Untuk mendorong masyarakat agar dapat melaksanakan kegiatan Siskamling maka Kepala Desa bersama dengan Binmas dan Babinsa memberikan ceramah pentingnya masyarakat terlibat di dalam kegiatan Siskamling untuk menciptakan kemandirian dan ketertiban yang lebih baik.

Untuk mengetahui pendapat responden tentang pengaruh ceramah / penyuluhan Kantibmas maka dapat dilihat pada tabel frekuensi di bawah ini :

Tabel: 8. Fungsi Kepala Desa dalam memberikan penyuluhan dan ceramah dalam mendorong masyarakat melaksanakan Siskamling.

No.	Klasifikasi	Bobot	F	Nilai skor	%
1	Sangat aktif	5	3	15	11
2	Aktif	4	11	44	41
3	Cukup aktif	3	9	27	33
4	Kurang aktif	2	4	8	15
5	Tidak aktif	1	0	0	0
N = 27	Jumlah		27	94	100
	Rata-rata			3,5	70 %

Sumber : Hasil Angket (2021)

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa Kepala Desa cukup aktif memberikan penyuluhan dan ceramah di Siskamling agar masyarakat bersedia melaksanakan Siskamling di setiap dusun / lingkungan pemukiman masing-masing, rata-rata pendapat responden (3,5) dengan katagori ”cukup aktif”, dan mencapai (70%) dari yang diharapkan.

5. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat

a. Kerjasama LPM membina masyarakat

Kepala Desa dalam melaksanakan pembinaan masyarakat menjadikan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Boddie sebagai mitra kerja. Oleh karena itu program kerja LPM dipadukan program pemerintah di dalam pembinaan kelembagaan dalam masyarakat.

Di Desa Boddie terdapat beberapa lembaga-lembaga masyarakat yang memerlukan pembinaan. Baik yang bergerak dibidang keagamaan, kepemudaan, remaja, ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Di bidang Keagamaan, maka di setiap Masjid terdapat panitia pembangunan dan juga Remaja Masjid, yang aktif melaksanakan pembinaan jamaah. Di bidang kesehatan terdapat beberapa Posyandu yang melakukan pelayanan kesehatan di setiap Lingkungan, Bahkan di Wilayah Desa Boddie terdapat Koperasi yang membina anggotanya dalam beberapa bentuk usaha.

Kepala Desa sebagai kepala pemerintah yang paling bawah dan dekat dengan masyarakat dan LPM sebagai lembaga pembangunan dan kemasyarakatan berfungsi untuk mendorong lembaga masyarakat untuk membina anggotanya. Oleh karena itu Kepala Desa dan LPM senantiasa menjalin kerjasama dan saling melakukan koordinasi dalam upaya pembinaan masyarakat.

Untuk mengetahui pendapat responden tentang pelaksanaan fungsi Kepala Desa di dalam mendorong lembaga kemasyarakatan membina masyarakat maka dapat dilihat pada tabel frekuensi di bawah ini :

Tabel: 9. Fungsi Kepala Desa dalam melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan

No.	Klasifikasi	Bobot	F	Nilai skor	%
1	Sangat aktif	5	5	25	19
2	Aktif	4	13	52	48

3	Cukup aktif	3	6	18	22
4	Kurang aktif	2	3	6	11
5	Tidak aktif	1	0	0	0
N = 27	Jumlah		27	101	100
	Rata-rata			3,7	74%

Sumber : Hasil Angket (2020)

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa Kepala Desa aktif melaksanakan fungsinya dalam melaksanakan pembinaan masyarakat di Desa Boddie, yakni rata-rata pendapat responden (3,7) dengan katagori "aktif" dan mencapai 74% dari yang diharapkan.

b. Kerjasama Tim Penggerak PKK

Kepala Desa di dalam memberikan pembinaan pemberdayaan perempuan dengan bekerjasama Tim Penggerak PKK Kantor Desa sebagai mitra kerja.

Tim Penggerak PKK Kantor Desa di dalam melaksanakan program POKJA mendapat dana pembinaan dari pemerintah daerah melalui Anggaran dana Kantor Desa. Dengan demikian PKK Kantor Desa dapat melaksanakan program kerja POKJA untuk membina dan meningkatkan kesejahteraan perempuan.

Untuk mengetahui pendapat responden tentang fungsi Kepala Desa di dalam mendorong PKK melaksanakan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga maka dapat dilihat pada tabel frekuensi di bawah ini :

Tabel: 10. Fungsi Kepala Desa dalam mendorong PKK melaksanakan pembinaan peningkatan kesejahteraan keluarga.

No.	Klasifikasi	Bobot	F	Nilai skor	%
1	Sangat aktif	5	7	35	26

2	Aktif	4	15	60	55
3	Cukup aktif	3	4	12	15
4	Kurang aktif	2	1	2	4
5	Tidak aktif	1	0	0	0
N = 27	Jumlah		27	109	100
	Rata-rata			4,0	80%

Sumber : Hasil Angket (2022)

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa Kepala Desa aktif melaksanakan pembinaan PKK pembinaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, dan rata-rata (4,0) dengan katagori ”aktif” dan mencapai 80% dari yang diharapkan.

Setelah dilaksanakan analisis tentang implementasi program strategis pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Desa Boddie yang dikoordinir langsung Kepala Desa yang meliputi 5 kriteria tersebut, maka dapat disimpulkan pendapat responden dalam suatu tabel frekuensi sebagai berikut:

Tabel 12 : Implementasi program strategis pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Desa Boddie dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

No.	Indikator	Nilai Skor	Persen tase
Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat :			
1	Pembangunan pemberdayaan masyarakat	3,6	72
2	Pemberdayan masyarakat melalui pembinaan administrasi Kependudukan	3,9	78
Pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan			

sarana desa dan partisipasi :			
1	Program Pembangunan jalan lingkungan	3,8	76
2	Partisipasi peningkatan usaha warga	3,7	74
Pelayanan Masyarakat :			
1	Pelayanan masyarakat di Kantor Desa	3,8	76
2	Koordinator pelayanan masyarakat	3,8	76
Penyelenggaraan ketertiban / ketentraman umum:			
1	Mengaktifkan kegiatan Poskamling	3,9	78
2	Penyuluhan Kantibmas	3,5	70
Pembinaan Kelembagaan Masyarakat :			
1	Kerjasama LPM membina masyarakat	3,7	74
2	Kerjasama PKK memberdayakan perempuan	4,0	80
Jumlah		37,7	754
Rata-rata		3,77	75,4

Berdasarkan data tersebut di atas, menunjukkan bahwa rata-rata nilai skor pendapat responden 3,77 dan rata-rata persentase 75.4 dari yang diharapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi program strategis pembangunan telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah Desa Boddie bersama warga masyarakat yang dikoordinir langsung Kepala Desa.

Uji Hipotesis (Regressi)

Untuk mengetahui apakah program strategis pembangunan yang sudah disusun oleh pemerintah desa berpengaruh terhadap implementasi (pelaksanaan) pembangunan

desa di Desa Boddie, maka dapat dianalisis dengan secara Regresi dengan menggunakan analisis SPSS.

Untuk menguji Hipotesis sebagaimana telah di tetapkan sebelumnya, yaitu ;

H.1 = Program strategis pembangunan berpengaruh terhadap implementasi (pelaksanaan) pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa di Desa Boddie dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

H.0 = Program strategis pembangunan tidak berpengaruh terhadap implementasi (pelaksanaan) pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa di Desa Boddie dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Dimana X = Implementasi Program Strategis Pembangunan

Y = Pelaksanaan Program Pemerintah Desa.

Hasil dari uji Statistik Regresi menggunakan SPSS menunjukkan bahwa implementasi program strategis pembangunan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan desa, hal ini ditunjukkan dengan nilai R sebesar 0,533 (nilai Regresi) dan nilai signifikan $0.001 < 0.005$ (dapat diterima) pada table Correlations dan Model Summary di bawah ini.

Correlations

		Program Pemerin Desa (Y)	Impl.Program Stratg (X)
Pearson Correlation	Program Pemerin Desa (Y)	1,000	,553
	Impl.Program Stratg (X)	,553	1,000

Sig. (1-tailed)	Program Pemerin Desa (Y)	.	,001
	Impl.Program Stratg (X)	,001	.
N	Program Pemerin Desa (Y)	27	27
	Impl.Program Stratg (X)	27	27

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics	
					R Square Change	F Change
1	,553 ^a	,306	,278	1,414	,306	11,009

Model Summary^b

Model	Change Statistics			
	df1	df2	Sig. F Change	
1	1	25	,003	1,697

a. Predictors: (Constant), Impl.Program Stratg (X)

b. Dependent Variable: Program Pemerin Desa (Y)

Hasil analisis dengan menggunakan SPSS, maka diketahui bahwa nilai Regressi 0.553 adalah semakin mendekati 1.00, dan nilai signifikan 0.001 lebih kecil dari 0.005 ($0.001 < 0.005$) dan $t_{hit} : 2318 > 1703 t_{tab}$ sehingga hipotesa (H.1) dapat diterima secara signifikan, yakni program strategis pembangunan berpengaruh terhadap implementasi (pelaksanaan) pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa di Desa Boddie

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artinya ada pengaruh yang sangat signifikan program strategis pembangunan desa, dengan pelaksanaan (implementasi) kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan dikoordinir oleh Kepala Desa di Desa Boddie, program strategis yang terdiri dari (a) pelaksanaan kegiatan pemerintahan keKepala Desa, (b) pemberdayaan masyarakat, (c) pelayanan masyarakat, (d) penyelenggaraan ketertiban / ketentraman umum, dan (e) pembinaan kelembagaan masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Boddie.

1. Faktor yang mempengaruhi

Faktor Pendukung

Terdapat beberapa faktor yang mendukung pemerintah Kantor Desa dalam menggali potensi masyarakat di Desa Boddie, antara lain yang menonjol:

a. Kepemimpinan Kepala Desa

Kepala Desa Boddie menerapkan kepemimpinan demokratis sehingga aparat Kantor Desa dan warga masyarakat sangat menghormati Kepala Desa dalam memimpin pemerintahan desa

Kepala Desa mampu membangun komunikasi dengan baik kepada seluruh aparatur desa, Kepala Dusun dan pengurus LPM dan organisasi sosial kemasyarakatan yang ada di desa, sehingga masalah yang muncul di dalam menggali potensi masyarakat di Desa Boddie berjalan dengan baik.

Masyarakat Desa Boddie Kecamatan Mandalle, tergolong masyarakat yang primordial, masih menghormati adat-istiadat dan kebiasaan yang ada di masyarakat, serta sangat hormat terhadap budaya desa, sehingga di Kepala Desa senantiasa

menyesuaikan diri dalam memimpin kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan dengan baik sebagaimana mestinya.

b. Partisipasi Masyarakat Cukup Tinggi

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Boddie tergolong cukup tinggi, terutama partisipasi dalam keikutsertaan penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui Musrembang Desa, partisipasi dalam membiayai berbagai bentuk pembangunan di Desa, terutama dalam pembangunan rumah ibadah/masjid, Poskamling, dan kegiatan sosial, kegiatan pembinaan kesehatan dan pendidikan, kegiatan olah raga dan sebagainya, yang diwujudkan dalam bentuk pemberian sumbangan-sumbangan apabila ada kegiatan yang dilaksanakan di desa tersebut. Bentuk partisipasi y

ang sangat menonjol adalah gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan dalam bentuk pembangunan fisik, baik jalan, gorong-gorong, saluran air dan sebagainya yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Oleh karena itu masyarakat mendukung setiap adanya gotong royong yang diprakarsai oleh pemerintah kantor desa.

Faktor Penghambat

a. Luasnya wilayah Desa

Desa Boddie memiliki wilayah yang cukup luas. Kondisi demikian menjadikan salah satu faktor penghambat yang dihadapi pemerintah desa dalam melaksanakan pembinaan untuk menggali potensi masyarakat.

b. Sarana dan prasarana sosial masih kurang/lemah

Sarana dan prasarana sosial kemasyarakatan di Desa Boddie masih sederhana dan minim, terutama sarana jalan desa atau jalan tani dan jembatan masih sangat sederhana. Selain dari pada itu peralatan dan perlengkapan di kantor desa masih sederhana pula, terutama penggunaan alat tulis menulis belum seluruhnya menggunakan mesin komputer. Kantor desa merupakan pusat informasi dan administrasi pemerintahan serta kemasyarakatan.

➤ **Pembahasan**

Dalam rangka pembangunan desa, maka terdapat beberapa kegiatan yang bersifat strategis yang menjadi pedoman pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang meliputi : Pelaksanaan administrasi pemerintahan, dan Pelaksanaan administrasi kependudukan. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi pemerintahan dan administrasi kependudukan dengan katagori aktif. Dalam hal ini Kepala Desa telah menunjukkan keaktifan memimpin dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan aktif. Kedua deskriptor tersebut merupakan kunci kegiatan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan kepada warga masyarakat, terutama masalah kependudukan, misalnya pelayanan masyarakat di dalam mengurus KTP dan KK serta hak-hak dasar penduduk lainnya seperti pengurusan Akta Kelahiran, di mana kantor desa sebagai pangkalan data kependudukan.
- b. Pemberdayaan masyarakat, yang meliputi : Melaksanakan program pembangunan sarana jalan, dan Mendorong masyarakat meningkatkan kegiatan usahanya.

Berdasarkan hasil analisis data, menunjukkan bahwa salah satu fungsi strategis Kepala Desa di dalam pembangunan adalah memperdayakan masyarakat dalam pembangunan, yang dapat meliputi berbagai deskripsi. Dalam hal ini adalah Kepala Desa senantiasa memikirkan dan berupaya agar supaya sarana sosial dan peningkatan kesejahteraan warga perlu dipersiapkan agar warga dapat meningkatkan kesejahterannya. Hasil analisis data menunjukkan Kepala Desa telah aktif di dalam mendorong pemberdayaan masyarakat melalui program pembangunan jalan yang menghubungkan lingkungan-lingkungan yang ada dalam wilayah Desa Boddie, sehingga tidak ada lagi lingkungan yang terisolir, dan warga dengan mudah melakukan transportasi. Selain daripada itu kepala desa aktif di dalam mendorong kegiatan usaha masyarakat dengan berbagai bentuk kebijakan, terutama mempermudah dan mempercepat pemberian rekomendasi pengurusan izin usaha.

- c. Pelayanan Masyarakat, yang meliputi : Memberikan pelayanan masyarakat di kantor desa, dan Koordinator pelaksanaan pelayanan masyarakat.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa kepala desa telah aktif di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama di dalam pelayanan yang bersifat administrasi, baik di dalam pemberian berbagai rekomendasi atau surat keterangan yang dibutuhkan warga dalam rangka kehidupan sosial, misalnya keterangan nikah, keterangan kepemilikan barang, keterangan warga miskin, dan sebagainya. Sebagai Pucuk pimpinan di Kelurahan atau sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan pemerintahan maka kepala desa aktif memperakarsai pelayanan masyarakat, baik yang dilaksanakan instansi atau lembaga pemerintahan maupun lembaga-lembaga masyarakat di wilayah Desa Boddie.

- d. Penyelenggaraan ketertiban/ketentraman umum, yang meliputi Mendirikan Poskamling di setiap Lingkungan Pemukiman dan Memberikan penyuluhan Kantibmas.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa kepala desa cukup aktif di dalam membina penyelenggaraan ketertiban / ketentraman umum. Tanggungjawab Kantibmas pada dasarnya ada dilingkungan Kepolisian (Polisi), di mana di Desa Boddie hanya ada seorang Polisi (Binmas) dan Babinsa yang berkoordinasi dengan Kepala Desa di dalam Kantibmas. Untuk lebih efektifnya Kantibmas, maka di setiap Dusun / pusat pemukiman dibentuk Siskamling yang dipusatkan pada Poskamling dan dikoordinir masing-masing Kepala Dusun.

- e. Pembinaan kelembagaan masyarakat, yang meliputi : Mendorong LPM melaksanakan pembinaan masyarakat dan Mendorong Tim Penggerak PKK Desa dalam memberdayakan perempuan.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa Kepala Desa telah aktif melaksanakan pembinaan dan kerjasama dengan LPM dan Tim Penggerak PKK di dalam pembinaan masyarakat dan Wanita. Kerjasama yang nyata dengan LPM terutama di dalam pelaksanaan Musrenbang setiap tahunnya, dalam rangka penyusunan program pembangunan desa, yang akan diusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk menjadi proyek pembangunan di kantor desa, terutama pembangunan fisik seperti perbaikan jalan, saluran air dan pembangunan fisik lainnya yang dibutuhkan warga masyarakat. Demikian pula dalam rangka pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, maka kepala desa senantiasa mendorong Tim Penggerakan PKK Desa untuk melaksanakan program kerja (Pokja), dan memberikan bantuan dana pembinaan melalui anggaran desa.

Oleh karena itu Kepala Desa di dalam melaksanakan fungsinya, yang meliputi pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketertiban / ketentraman umum, dan pembinaan kelembagaan masyarakat telah dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan data hasil analisis data secara persentasi dari pendapat responden menunjukkan bahwa rata-rata nilai skor pendapat responden 3,77 dan rata-rata persentase 75.4 dari yang diharapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi program strategis pembangunan telah dilaksanakan cukup baik oleh pemerintah Desa Boddie bersama warga masyarakat yang dikoordinir langsung Kepala Desa.

Ketidak-mampuan mencapai 100% dari yang diharapkan karena beberapa faktor penghambat, terutama :

1. Masih terbatasnya dana yang diterima Pemerintah Desa dalam mengoperasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan, terutama masih rendahnya jumlah Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Daerah
2. Luasnya wilayah Desa Boddie yang terdiri dari dua dusun, yakni Dusun Lempangeng dan Lamasa dengan kondisi wilayah yang masih sulit dijangkau dengan baik oleh sarana transportasi kendaraan sepeda motor
3. Terbatasnya tenaga kerja, aparat desa yang dapat melaksanakan tugas operasional dalam tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, selain dari pada itu SDM aparat desa masih rendah dalam menangani administrasi pemerintahan dan pembangunan, dan
4. Sebagian besar warga masyarakat masih bergerak di sektor pertanian, dengan tingkat pendidikan tergolong rendah, dan tingkat penghasilan rendah, sehingga

rata-rata penduduk desa masih rendah tingkat partisipasinya di dalam pembangunan, baik partisipasi dana maupun partisipasi untuk memberikan pemikiran-pemikiran yang konseptual terhadap pemberdayaan masyarakat.

D.KESIMPULAN DAN SARAN

➤ Kesimpulan

1. Hasil penelitian menunjukkan implementasi program strategis pembangunan telah dilaksanakan dengan baik Di Desa Boddie. Rata-rata nilai skor pendapat responden 3,77 dan rata-rata persentase 75.4 yang berarti Kepala Desa telah melaksanakan program-program strategis pembangunan desa dengan baik di desa tersebut.
2. Faktor-faktor yang mendukung dalam pengimplementasian program strategis pembangunan desa, terutama kepemimpinan demokratis Kepala Desa, tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi. Sedangkan faktor penghambat terutama luas desa yang cukup luas, kondisi wilayah masih sulit dijangkau dengan baik sarana transportasi kendaraan sepeda motor, dan terbatasnya sarana dan prasarana sosial masih sederhana / kurang.

➤ Saran

1. Hasil analisis data menunjukkan bahwa implementasi program strategis pembangunan telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah Desa Boddie bersama warga masyarakat yang dikoordinir langsung Kepala Desa. Disarankan agar pemerintah Desa Boddie agar lebih meningkatkan fungsinya mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
2. Disarankan agar Kepala Desa meningkatkan peranannya di dalam pelaksanaan pembangunan dan mengerakkan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di desa, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik, dengan

tetap melaksanakan Musrembang, melibatkan warga dusun / lingkungan sampai Musrembang tingkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Purnami Wulandari. 2014, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pelatihan Pembuatan Sapu Gelagah Di Desa Kajongan Kabupaten Purbalingga*, Skripsi, Fakultas Ilmu Pendidikan UNY Yogyakarta,
- Bintaro, 2011, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Yogyakarta, Penerbit Galia Indonesia
- Hanif Norcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta, Erlangga
- Martiana Dewi Rahayu, 2018, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Sinarsari Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Miftachul Huda, 2009, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Saban Echdar, H, 2017, *Metode Penelitian Manajemen Dan Bisnis*, Jakarta, Bogor, Ghalia Indonesia
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Cetakan ke-7, Alfabeta
- , 2013, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Cetakan ke-7, Alfabeta
- Sukmawati, 2015, *Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musrembang di Desa Mandalle Kabupaten Pangkep*, Skripsi STIA AG Barru
- Sunit Agus Tricahyono, 2008, *Pemberdayaan Komunitas Terpencil di Propinsi NTT*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Sunyoto Usman, 2010, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Totok dan Poerwoko, 2012, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta.

Tresia, Aprilia, dkk, 2014, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung, Penerbit Alfabeta

STIA Al Gazali Barru, 2019, *Panduan Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi, di Lingkungan Sekolah Tinggi Administrasi Publik (STIA) Al Gazali Barru*

Siagian, P. Sondang, 2017, *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya*, Bumi Aksara, Jakarta.

Wahab, Abdul, Solichin, 2008, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Malang, Universitas Muhammadiyah, Malang, Press

Dokumentasi

Undang-undang No. 6 Tahun 2014

Undang-undang No. 23 tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam negeri RI No. 114 Tahun 2014, tentang *Pedoman Pembangunan Desa*

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang *Desa*

Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 2014 tentang *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Thun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)*

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2018 tentang *Prioritas Pemnggunaan Dana Desa*.